

Kolaborasi Perpustakaan Umum dan TBM dalam Penyediaan Akses Koleksi Perpustakaan Bagi Masyarakat Daerah Terpencil

Kamilah Kinanti¹, Isti Sulastari², Sabrina Yulianti³

^{1,2} Perpustakaan Nasional Republik Indonesia & ³Brain Academy

E-mail: kinanti.kamilah@gmail.com, isti.sulastari@gmail.com

Diajukan: 4-12-2023; Direvisi: 24-01-2024; Diterima: 14-03-2024

Abstract

Public libraries have a function to support the preservation of their respective regional cultural products and to facilitate the creation of a lifelong learning community. In practice, there are many obstacles faced by public libraries, one of which is access constraints. In addition to public libraries, the community is also obliged to support the availability of the library service facilities in their environment. In this research, Community Reading Garden/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) represent the community as a supporting element in efforts to provide library access, especially for remote areas. The purpose of this research is to determine the efforts of the District Dispusip. X in providing access to library collections in remote areas, reveals the potential of TBM to support providing library access in remote areas, and the forms of collaboration expected by both parties. The research was carried out using a descriptive qualitative approach using interview data collection methods and case study observations at Dispusip District X and 5 TBMs in remote areas in District X, NTB Province. Based on the research, the results showed that TBM in X in providing library access in remote areas. The collaboration most expected by TBM is related to providing book collections.

Keywords: public library collaboration; community reading gardens collaboration; access library collections; community reading gardens in remote area

Abstrak

Perpustakaan umum memiliki fungsi untuk mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dalam praktiknya banyak kendala yang dihadapi perpustakaan umum, salah satunya adalah kendala akses. Selain perpustakaan umum, masyarakat juga berkewajiban mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya. Pada penelitian ini Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menjadi representasi masyarakat sebagai unsur pendukung upaya penyediaan akses perpustakaan khususnya bagi daerah terpencil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dispusip Kab. X dalam memberikan akses koleksi perpustakaan di daerah terpencil, mengungkap potensi TBM untuk mendukung penyediaan akses perpustakaan di daerah terpencil, dan bentuk kolaborasi yang diharapkan kedua pihak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Dispusip Kab. X dan 5 TBM di daerah terpencil di Kab. X, Provinsi NTB. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa TBM di Kab. X memiliki potensi yang besar melalui sumber daya dan program-programnya untuk membantu tugas Dispusip Kab. X dalam penyediaan akses perpustakaan di daerah terpencil. Kolaborasi yang paling diharapkan oleh TBM adalah terkait dengan penyediaan koleksi buku.

Kata Kunci: kolaborasi perpustakaan umum; kolaborasi tbm; akses koleksi perpustakaan; tbm daerah terpencil

Pendahuluan

Perpustakaan umum adalah salah satu jenis perpustakaan yang memiliki fungsi untuk mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat (UU No. 43/2007). Pada skala internasional, urgensi

perpustakaan umum juga tergambar dengan hadirnya IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 2022 yang menyatakan bahwa layanan perpustakaan umum disediakan atas dasar kesetaraan akses untuk semua, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa atau status sosial. Misi utama IFLA/UNESCO bagi perpustakaan umum secara garis besar berhubungan dengan informasi, literasi, pendidikan, inklusivitas, partisipasi masyarakat dan budaya sebagai inti dari layanan. Namun, dalam praktek di lapangan masih banyak kendala yang dihadapi perpustakaan umum untuk berperan sesuai kaidahnya, salah satunya adalah kendala akses.

Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI merilis hasil survei terkait aktivitas literasi di Indonesia, yakni survei Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi yang menunjukkan hasil rata-rata indeks Alibaca Nasional Indonesia berada di titik 37,32% yang tergolong rendah, dimana ada 9 provinsi dengan aktivitas literasi sedang (26%), 24 provinsi dengan aktivitas literasi rendah (71%), 1 provinsi dengan aktivitas literasi sangat rendah (3%), dan tidak satu pun provinsi yang masuk kategori aktivitas literasi tinggi atau sangat tinggi. Dalam indeks ini, perpustakaan umum sangat mempengaruhi indikator Dimensi Akses, serta dapat pula berpengaruh pada indikator Dimensi Budaya. Meski demikian, Dimensi Akses justru merupakan dimensi dengan nilai indeks paling rendah yakni 23,09%. Dalam laporannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) menyimpulkan 3 kendala yang menjadi penyebab rendahnya rata-rata indeks Alibaca Indonesia. Pertama, kondisi perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah untuk mendukung program gerakan literasi sekolah masih jauh dari memadai. Kedua, kondisi literasi keluarga dan masyarakat juga tidak lebih baik karena minimnya jumlah perpustakaan umum dan toko buku, dimana menurut data Perpustakaan Nasional tingkat ketersediaan perpustakaan secara nasional baru terpenuhi 20%, yakni 154.359 perpustakaan dari rasio kebutuhan sebesar 767.951 perpustakaan (Lakip Perpustakaan 2016, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Ketiga, rendahnya akses masyarakat terhadap bacaan yang terkonfirmasi dari hasil survei Statistik Sosial Budaya oleh Badan Pusat Statistik (2015) mengenai persentase penduduk di atas 10 tahun yang mengakses media, dimana pembaca surat kabar sekitar 18,9 % di tahun 2009 menjadi 13,11% di tahun 2015 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Dari kerangka subindikator dan hasil survei Indeks Aktivitas Literasi Membaca tergambar bahwa faktor akses kepada perpustakaan umum mempunyai peran penting bagi iklim aktivitas literasi di Indonesia, sehingga kendala-kendala yang terjadi pada akses perpustakaan umum berpengaruh besar pada aktivitas literasi secara keseluruhan. Meski demikian, menuntut pertanggungjawaban hanya kepada pemerintah bukan sepenuhnya solusi yang tepat, karena pada UU No. 43 Tahun 2007 pasal 6 disebutkan bahwa masyarakat juga berkewajiban mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya. Dasar hukum ini menandakan bahwa ada ruang penyelesaian masalah Dimensi Akses dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis melibatkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai representasi masyarakat sebagai unsur pendukung upaya penyediaan akses perpustakaan khususnya bagi daerah terpencil. Terlebih, TBM juga turut menjadi unsur penilaian dalam sub indikator Dimensi Akses, yakni akses di masyarakat melalui Perpustakaan Komunitas (TBM dan Pustaka Bergerak) per seribu penduduk, serta sub indikator Dimensi Budaya yang salah satunya adalah memanfaatkan taman bacaan. Di Indonesia penyelenggaraan TBM diampu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Walaupun berbeda garis koordinasi dan cara pengelolannya, tetapi tujuan penyelenggaraan TBM sejalan dengan misi perpustakaan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) TBM merupakan layanan dan atau ruang gerakan literasi yang diinisiasi oleh dan untuk masyarakat. Ada tiga fungsi yang melekat pada TBM, yakni sebagai sumber belajar, sumber informasi, dan sarana rekreasi-edukasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Pada kajian ini, penulis mengambil lokus penelitian di daerah terpencil di Kabupaten X, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam survei Indeks Aktivitas Literasi Membaca, Provinsi NTB ada di peringkat 25 dari 34 provinsi dengan status aktivitas literasi rendah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Dinas Perpustakaan Kab. X dalam memberikan akses koleksi perpustakaan kepada masyarakat di daerah terpencil?
2. Apa saja potensi yang dimiliki oleh TBM di Kab. X untuk mendukung penyediaan akses koleksi perpustakaan di daerah terpencil?
3. Apa bentuk kolaborasi yang diharapkan kedua pihak dalam penyediaan akses koleksi perpustakaan di daerah terpencil?

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kab. X dalam memberikan akses koleksi perpustakaan kepada masyarakat di daerah terpencil, potensi yang dimiliki TBM di Kab. X untuk mendukung penyediaan akses perpustakaan di daerah terpencil, serta memberikan rekomendasi bentuk kolaborasi yang tepat sesuai harapan kedua pihak dalam penyediaan akses koleksi perpustakaan di daerah terpencil di Kab. X. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan dan rekomendasi konsep kolaborasi perpustakaan dan TBM, khususnya pada wilayah yang memiliki kemiripan karakter dengan lokus penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Perpustakaan Umum Kabupaten X

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten X (selanjutnya disingkat Dispusip Kab. X) berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten X, dijelaskan bahwa Dispusip Kab. X mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Dispusip Kab. X menyelenggarakan sejumlah fungsi, yakni:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan halaman *website* Dispusip Kab. X diperoleh data bahwa sepanjang tahun 2019 tercatat ada 2.314 orang anggota aktif perpustakaan umum atau 0,22% dari total jumlah penduduk. Angka ini masih belum mencapai target standar jumlah anggota perpustakaan berdasarkan SNP, yakni paling sedikit 2% dari jumlah penduduk kabupaten/kota. Sementara untuk jumlah pengunjung mencatat angka yang lebih baik, yakni 20.523 pengunjung per tahun 2019 atau 1,98% dari total jumlah penduduk. Di samping itu, untuk sirkulasi buku, pada tahun 2019 total sirkulasi buku di Dispusip Kab. X adalah 11.008, sehingga apabila dihitung perbandingan antara jumlah penduduk kabupaten dan sirkulasi koleksi Dispusip Kab. X hanya 1,06 % penduduk yang pernah meminjam koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

TBM adalah layanan dan/atau ruang gerakan literasi yang diinisiasi oleh dan untuk masyarakat. Selain menyediakan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan minat dan budaya baca serta pengembangan literasi di

masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, p. 3). Tujuan didirikannya TBM diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca.
2. Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca.
3. Membangun masyarakat membaca dan belajar.
4. Mendorong mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
5. Mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya, maju, dan beradab. (Saepudin, 2017, p. 4)

Berdasarkan pemaparan di atas, peran TBM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang dilayani dalam berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mengembangkan kualitas SDM di daerah tersebut sehingga bisa meningkatkan daya saing warganya dan mengubah keluarga prasejahtera menjadi keluarga yang sejahtera. Keberadaan TBM diharapkan menjadi sarana belajar mandiri untuk warga melalui pendidikan informal.

Koleksi Perpustakaan

Dalam UU No. 43/2007, dijelaskan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Dalam Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan RI tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (2017) juga dinyatakan bahwa jenis koleksi perpustakaan kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. Jenis koleksi perpustakaan kabupaten/kota terdiri dari karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik. Berikut adalah cakupan dari masing-masing jenis tersebut: 1) Karya tulis, terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip; 2) Karya cetak, terdiri dari buku dan terbitan berkala; 3) Karya rekam, terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; 4) Karya dalam bentuk elektronik, termasuk koleksi digital. Standar tersebut juga mengatur jumlah koleksi per kapita yang disesuaikan pada tipologi perpustakaan, yaitu jumlah judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe C paling sedikit: 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit: 6.000 judul, dan tipe A paling sedikit: 7.000 judul. Di samping itu, terkait dengan kemutakhiran koleksinya diatur bahwa koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.

Kolaborasi

Kata kolaborasi memiliki arti sebagai kerja sama untuk mencapai efisiensi dan efektivitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Penggunaan istilah kolaborasi diperkenalkan pada awal abad ke-19 di lingkup industri ketika format organisasi menjadi lebih kompleks yang menuntut pembagian tugas dan penyebaran tenaga kerja yang lebih rumit (O'Flynn dan Wanna, 2008). Saleh dan Hanafi (2020) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan proses kerja sama secara intensif dari beberapa orang atau lembaga yang memiliki 'irisan' kepentingan yang sinergis dari dua pihak atau lebih. Dari penjelasan para pakar tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan bentuk kerja sama yang intensif dari beberapa orang, organisasi, atau jaringan kerja melalui berbagai jenis kegiatan demi mencapai suatu tujuan bersama.

Saleh dan Hanafi (2020) menyatakan bahwa pertimbangan dan alasan kolaborasi pada umumnya disebabkan oleh: 1. Adanya kesamaan tujuan atau kepentingan; 2. Peningkatan kemampuan; 3. Efisiensi penggunaan sumber daya (meliputi sumber daya manusia, finansial, dan material); 4. Berbagi pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dsb. Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat, konsep kolaborasi menjadi hal yang penting. Menurut Raharja dan

Akhmad (2019), konsep kolaborasi hadir sebagai kritik terhadap teori intraorganisasi. Di samping itu, berdasarkan teori interorganisasi, yang berwenang menangani dan mengurus masalah-masalah publik saat ini bukan hanya pemerintah saja; pihak di luar pemerintah bisa terlibat dengan pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik melalui keterikatan jaringan (*interorganizational network*), dengan syarat organisasi mau membuka untuk melakukan kontak dan jaringan kerja dengan organisasi lain. Sedangkan dalam kacamata pembangunan suatu bangsa, ada dua unsur pokok yang mempengaruhinya, pertama, masalah materi yang akan dihasilkan dan dibagikan; kedua, manusia yang menjadi pengambil inisiatif untuk menjadi manusia pembangun (Tasruddin, 2015). Pembangunan yang hanya berfokus pada sisi materi saja akan menghasilkan pembangunan yang kurang berkelanjutan. Sementara pembangunan yang melibatkan manusia—yang dalam hal ini adalah masyarakat—akan menciptakan pembangunan yang produktif dan hasil pembangunan terdistribusi.

Kolaborasi dapat terjadi dengan melibatkan beragam pihak, baik individu, kelompok, atau instansi. Dalam penelitian ini, kolaborasi yang dikaji melibatkan institusi Dispusip Kabupaten dan kelompok-kelompok yang diwakili oleh TBM. Hubungan pemerintah dan lembaga ini lekat kaitannya dengan salah satu konsep kolaborasi, yakni *collaborative governance*. Menurut Irmadella (2018), telah terjadi perubahan pola tata kelola pemerintahan dan manajemen publik di Indonesia yang semula berpusat pada pemerintah menjadi tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif melibatkan pemerintah, elemen masyarakat, organisasi non-pemerintah termasuk pihak swasta dan menekankan pada kolaborasi di antara ketiga pilar *governance* tersebut, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pola kolaborasi ini disebut dengan *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan *collaborative governance* adalah bentuk pengelolaan pemerintahan dimana terdapat satu atau beberapa agensi publik yang secara langsung melibatkan *stakeholders* non-pemerintah dalam membuat keputusan dan dilakukan secara formal, bersifat deliberatif, dan memiliki tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengatur aset atau program publik. Ada 6 kriteria yang diperlukan dalam *collaborative governance*, yaitu: (1) Forum yang diinisiasi lembaga publik atau lembaga; (2) peserta forum termasuk yang non-pemerintah; (3) peserta yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan; (4) forum yang dilakukan secara formal dan bertemu secara kolektif; (5) forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (meskipun dalam praktiknya tidak tercapai); (6) fokus pada kebijakan publik dan manajemen (Ansell dan Gash, 2008).

Sementara itu, berdasarkan tenggat waktunya, kolaborasi dapat dibedakan menjadi kolaborasi temporer dan kolaborasi permanen (Saleh dan Hanafi, 2020, p. 25). Menurut Saleh dan Hanafi (2020, p. 26) kolaborasi temporer hanya dilakukan sesekali saja pada saat ada dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan satu sama lain, dalam rangka melakukan kerja sama atau penanggulangan masalah bersama yang sifatnya ringan. Sementara, kolaborasi permanen membutuhkan tenggat atau masa kerja yang relatif panjang, bisa dalam kurun waktu satu tahun atau *multi-years collaboration*. Oleh karena itu, pelaksanaan kolaborasi permanen memerlukan perencanaan yang matang karena di dalamnya ada peran, tanggung jawab, dan implementasi yang harus disepakati oleh masing-masing kolaborator. Pertimbangan tenggat waktu kolaborasi sangat penting untuk disepakati sebelum kolaborasi dimulai, karena akan berpengaruh pada perjalanan kolaborasi itu sendiri, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik di masa depan.

Ada sejumlah referensi yang memaparkan tentang proses dan tahap kolaborasi, khususnya dalam konteks kolaborasi yang melibatkan organisasi pemerintah, diantaranya adalah proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) serta tahap kolaborasi yang dikemukakan oleh Saleh dan Hanafi (2020). Proses kolaborasi yang dipaparkan Ansell dan Gash (2008, p. 544)

merupakan serangkaian komponen yang membentuk suatu siklus, mempengaruhi satu sama lain, serta proses *collective decision-making*. Berikut beberapa komponen dalam proses kolaborasi tersebut:

1. Dialog Antar-Muka
2. Membangun Kepercayaan
3. Komitmen Pada Proses Kolaborasi
4. Pemahaman Bersama
5. Dampak Sementara

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Menurut Raharjo (2017), studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang peristiwa yang selanjutnya disebut sebagai kasus. Kasus yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Dispusip Kab. X dalam penyediaan akses koleksi perpustakaan bagi masyarakat di daerah terpencil, serta pola kolaborasi yang dapat terjalin Dispusip Kab. X dengan komunitas masyarakatnya dalam hal penyediaan koleksi perpustakaan.

Penelitian ini mengambil informan yaitu para pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan di Dispusip Kab. X dan pengelola TBM di daerah terpencil Kabupaten X. Pemilihan TBM yakni berdasarkan *purposive sampling*. Adapun kriteria informasi untuk pustakawan dan atau tenaga perpustakaan di Dispusip Kab. X adalah pustakawan dan atau tenaga perpustakaan yang telah bekerja di Dispusip Kab. X selama minimal 2 tahun dan terlibat langsung pada program atau kegiatan penyediaan akses koleksi perpustakaan kepada masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil 3 informan yang berasal dari Dispusip Kab. X. Sementara itu, kriteria pengelola yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah:

- a) Pengelola TBM yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun.
- b) TBM berada di daerah terpencil Kabupaten X. Daerah terpencil di sini mengacu pada definisi yang diberikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, yakni daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan, rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi. Adapun terdapat 12 wilayah di Kabupaten X, pada penelitian ini akan mengambil 5 informan pengelola TBM yang berada di wilayah terpencil tersebut.

Teknik pengumpulan data pada penelitian studi kasus dapat didapat dari enam sumber, yaitu dokumen, rekod/arsip, wawancara, observasi langsung, observasi terlibat, dan artefak (Yin, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan tiga teknis, yaitu wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan bulan Agustus-Oktober 2021. Pada penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, untuk pengumpulan data, peneliti bekerjasama dengan dua orang penggiat TBM di Kab. X. Kedua orang penggiat TBM ini sebagai peneliti lapangan yang membantu dalam pengumpulan data ke TBM-TBM wilayah terpencil di wilayah Kab. X. Sementara, pengumpulan data terkait Dispusip Kab. X dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui daring. Sementara itu, observasi dilakukan oleh peneliti lapangan dengan mendatangi langsung TBM yang berada di wilayah terpencil Kabupaten X.

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka dilanjutkan menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2020). Yin (2004) menyatakan bahwa terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan pada penelitian studi kasus, yaitu *pattern-matching*, *explanation-building*, *time series analysis*, *the use of logic models*, dan *cross-case synthesis*. Penelitian ini menggunakan teknik *explanation building*. Teknik ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan membangun penjelasan tentang kasus ini. Teknik ini sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan bagaimana upaya telah dilakukan oleh Dispusip Kab. X dalam penyediaan akses koleksi perpustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Dispusip Kab. X dalam Memberikan Akses Koleksi Perpustakaan Kepada Masyarakat di Daerah Terpencil

Ada dua upaya yang dilakukan oleh Dispusip Kab. X untuk memberikan akses koleksi kepada masyarakat di daerah terpencil, yakni pemberian hibah buku dan layanan perpustakaan keliling. Menurut informan Ana, sebelum tahun 2017 ketika Dispusip Kab. X masih berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), pemberian akses koleksi pada masyarakat yang dilakukan adalah peminjaman buku sementara ke sekolah atau TBM dalam jangka waktu beberapa bulan, kemudian ditukar dengan koleksi lainnya. Pihak yang meminjam bertanggung jawab mengambil buku-buku pinjaman tersebut ke Dispusip Kab. X, atau jika lokasinya jauh maka Dispusip Kab. X yang membawakan koleksi buku sekaligus melakukan pengawasan. Sejak tahun 2017, sistem pemberian akses dengan metode peminjaman berubah menjadi hibah buku dikarenakan ada anggaran untuk menyisihkan koleksi buku baru untuk disumbangkan ke TBM, perpustakaan rumah ibadah, atau desa yang menjadi binaan Dispusip Kab. X. Program ini berada di bawah bidang SDM, yang pada perpustakaan lainnya umum lainnya disebut dengan bidang pembinaan. Untuk program hibah buku sendiri masih dilakukan. Pada tahun 2020 hingga 2021, buku yang dihibahkan adalah buku-buku lama yang sudah tidak dimanfaatkan oleh Dispusip Kab. X, informan menekankan terlebih sejak pandemi tidak ada anggaran pembelian buku baru untuk dihibahkan.

“Kalau saat ini untuk program yang rolling ke sekolah cuma beberapa aja misalnya yang akan mengikuti Lomba perpustakaan sekolah aja sekarang begitu karena ada hibah buku untuk TBM dan desa tapi untuk tahun ini dan tahun depan kami menghibahkan buku lama jadi tidak ada anggaran pembelian buku baru bagi perpustakaan binaan jadi kami mengganti dengan buku koleksi lama yang jarang dimanfaatkan atau jarang dibaca di Dinas itu yang kami hibahkan ke TBM-TBM” – Ana

Menurut informan Ana, salah satu cara pemberian akses bacaan Dispusip Kab. X terkait dengan akses bahan bacaan kepada masyarakat wilayah terpencil adalah melalui layanan perpustakaan keliling (Pusteling). Ana menyatakan, sebelumnya Pusteling baru mengunjungi sekolah saja, dan baru-baru ini Pusteling juga mulai berkunjung ke TBM-TBM di daerah terpencil.

“Kebetulan ada 2 unit di sini, jadi secara bergantian itu keliling untuk ke sekolah-sekolah sih baru, kemarin baru ke sekolah-sekolah sama TBM yang di daerah-daerah terpencil” – Ana

Ada sekitar 2.000 koleksi buku di setiap mobil Pusteling Dispusip Kab. X. Bagi sekolah yang lokasinya tidak begitu jauh dari Dispusip Kab. X, Pusteling memberikan fasilitas peminjaman buku, tetapi untuk sekolah yang lokasinya jauh, Pusteling hanya memberikan layanan baca di tempat. Adapun, lokasi terjauh yang pernah dikunjungi oleh mobil Pusteling Dispusip Kab. X adalah TBM di Kecamatan Y.

Ana juga melihat bahwa anak-anak dan masyarakat di daerah terpencil cenderung lebih antusias dalam memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan. Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan program Pusteling ke desa-desa di wilayah X. Saat mobil Pusteling berkunjung tanpa rencana, anak-anak dan masyarakat antusias untuk mendatangi Pusteling, bahkan ketika jam layanan Pusteling tersebut sudah habis, masyarakat meminta agar mobil Pusteling datang kembali dan membuat jadwal tetap bagi mereka.

"Biasanya kami kalo perpustakaan keliling-keliling ke daerah-daerah terpencil antusiasnya itu sangat tinggi, sampai-sampai seperti... Walau pun ga harus hubungi pihak sana dulu misalnya tiba-tiba kami datang ke sana mereka sangat antusias, sampai kalo misalnya harus sudah waktunya untuk pulang gitu mereka bilang "kapan ke sini lagi?" dan "kok cepat sekali sampai setengah hari aja?" gitu, intinya kami diminta untuk menjadwalkan memang yang daerah-daerah yang agak terpencil yang jauh dari kota kabupaten" – Ana

Ana menjelaskan bahwa Kepala Dispusip Kab. X dan pihak TBM menginginkan untuk diadakannya jadwal mobil Pusteling secara rutin ke daerah-daerah yang jauh dari gedung perpustakaan Dispusip Kab. X. Sebelum pandemi COVID-19, jadwal tersebut sudah dibuat yakni Senin-Kamis untuk wilayah-wilayah yang jauh, serta Jumat untuk wilayah di sekitar Kota Y.

Prosedur pemberian layanan Pusteling adalah dengan pengajuan proposal permohonan kunjungan Pusteling dari pihak yang ingin dikunjungi, kemudian akan diteruskan dan diminta rekomendasi apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Ana menambahkan bahwa promosi terkait layanan ini dilakukan ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kab. X dengan cara memberikan brosur kepada pengunjung Musrenbang, sehingga brosur tersebut dapat dibawa ke desanya. promosi dilakukan ketika ada kegiatan lomba-lomba, seperti lomba menggambar dan mewarnai dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dispusip Kab. X. Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa kegiatan layanan perpustakaan keliling dan kursus tersebut sudah tidak bisa diadakan lagi selama pandemi yakni mulai April 2020 karena adanya pembatasan mobilitas (PPKM). Akhirnya, pada bulan Oktober 2021, mobil Pusteling kembali beroperasi dan mengunjungi 2 titik.

Jika dianalisis menggunakan konsep *collaborative governance* dapat dilihat bahwa sejauh ini praktik program Dispusip Kab. X dan TBM di merupakan bentuk pengelolaan pemerintah yang di mana agensi publik yang secara langsung melibatkan *stakeholders* non-pemerintah dalam membuat keputusan dan dilakukan secara formal, bersifat deliberatif, dan memiliki tujuan dalam membuat atau menerapkan kebijakan publik hanya terlaksana pada tahap kondisi awal (Ansell & Gash: 2008), sehingga kegiatan hibah buku maupun kegiatan Pusteling tidak bisa dikelompokkan menjadi *collaborative governance*. Padahal, proposal-proposal yang diterima oleh Dispus Kab. X memperlihatkan adanya kebutuhan dari TBM-TBM terhadap hibah buku dan kunjungan perpustakaan keliling. Dua kegiatan ini juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan sumber daya yang dalam hal ini adalah buku. Permasalahan terlihat sangat jelas: TBM memiliki keterbatasan buku, sementara Dispus Kab. X memiliki porsi untuk membagikan buku yang dianggap layak untuk diberikan ke TBM, atau memberikan akses terhadap buku dengan cara mendatangi lokasi yang jauh dengan mobil perpustakaan keliling. Maka dari itu, kondisi tersebut seharusnya sangat mendukung terciptanya kolaborasi pada kedua pihak. Sementara itu, tahapan fasilitatif sampai proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008: 551), belum dilaksanakan oleh Dispusip Kab. X di semua kegiatan tersebut.

Dikarenakan belum adanya kegiatan kolaborasi Dispusip Kab. X dengan TBM yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini akan dibahas kegiatan kerja sama yang telah dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Pembahasan ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk memberikan saran

yang relevan agar kerja sama yang terjalin ini dapat meningkat menjadi bentuk kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ina, Ana, dan Ani, dapat disimpulkan bahwa Dispusip Kab. X telah melakukan 4 (empat) program yang melibatkan TBM sesuai Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Kegiatan Kerja Sama yang Telah Dilakukan Antara Dispusip Kab. X dengan TBM

No	Program/Kegiatan	Keterlibatan TBM	Target Penerima Manfaat	Waktu Kerjasama
1	Hibah Buku	Penerima hibah buku	a. Sebelum Tahun 2021: Perpustakaan Rumah Ibadah dan TBM b. Tahun 2021: TBM	Setiap tahun dapat mengajukan
2	Perpustakaan Keliling	Didatangi tempatnya oleh Perpustakaan keliling	a. Sekolah b. TBM c. Desa d. Pihak lainnya yang mengajukan.	Sesekali (tergantung permohonan)
3	Kursus	Pengelola TBM menjadi narasumber	Seluruh masyarakat	Sesekali (tergantung permohonan dari Dispusip)
4	Lomba-lomba	Menjaring peserta yang berasal dari anak didik TBM	a. Sebelum Tahun 2021: Sekolah dan TBM b. Tahun 2021: TBM	Setiap tahun (tergantung kondisi)

Dari keempat kegiatan di Tabel 1, kegiatan yang menurut peneliti paling mendekati pencapaian tujuan pemberian akses koleksi perpustakaan di wilayah terpencil adalah kegiatan hibah buku dan Pusteling. Dari 5 (lima) TBM yang menjadi subjek penelitian ini, TBM ABC Biru dan Kuning belum pernah terlibat kegiatan hibah buku; TBM Hijau, Jingga, dan Merah sudah pernah terlibat dalam program hibah buku. Sementara TBM ABC Biru, Merah, dan Jingga belum pernah terlibat pada kegiatan Pusteling; TBM Hijau dan Kuning pernah terlibat kegiatan Pusteling.

Potensi TBM di Kab. X untuk Mendukung Penyediaan Akses Koleksi Perpustakaan di Daerah Terpencil

Kesadaran akan eksistensi TBM ini menjadi potensi awal yang penting bagi terjalinnya kolaborasi antara kedua lembaga, sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash (2008, p. 544), salah satu komponen proses kolaborasi adalah Dialog Antar-Muka. Proses dialog tentunya hanya dapat terwujud ketika ada komunikasi, kesadaran dan saling mengenal memperkuat peluang komunikasi antara Dispusip dan TBM. Dalam sudut pandang Dispusip yang diwakili informan Ana, ia sudah mengetahui adanya kegiatan-kegiatan TBM di Kab. X yang tergambar dari pernyataan berikut:

“Kerja samanya kemarin sih, baru tahun ini sejak mulai ada gairah-gairahnya TBM di kabupaten ini jadinya kami adakan lomba antar TBM” — Ana

Ana juga melihat potensi dari TBM yang menguntungkan bagi Dispusip. Pertama, menambah jumlah anggota dan pengunjung Dispusip Kab. X. Berdasarkan penuturan Ana, biasanya dalam satu minggu sekali ada TBM yang membawa anak-anak anggota TBM-nya untuk berkunjung dan membuat kartu anggota di Dispusip Kab. X, tetapi kunjungan tersebut tidak bersifat rutin atau terjadwal. Potensi kedua, Ana melihat bahwa anak-anak dan masyarakat di daerah terpencil cenderung lebih antusias dalam memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan. Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan program Pusteling ke desa-desa di wilayah X. Saat mobil Pusteling berkunjung tanpa rencana, anak-anak dan masyarakat antusias untuk mendatangi Pusteling, bahkan ketika jam layanan Pusteling tersebut sudah habis, masyarakat meminta agar mobil Pusteling datang

kembali dan membuat jadwal tetap bagi mereka. Potensi yang ketiga, Ana menyadari bahwa akses bahan bacaan untuk anak-anak daerah terpencil sangat terbatas. Kesadaran dari informan Ana ini dapat menjadi pijakan penting dalam mewujudkan terjadinya kolaborasi antara Dispusip dan TBM. Secara teori, salah satu alasan yang berpotensi menciptakan ruang kolaborasi antara dua lembaga adalah kesamaan tujuan dan kepentingan (Saleh dan Hanafi, 2020), yang dalam konteks pernyataan Ana adalah kepentingan untuk mengupayakan akses koleksi perpustakaan di daerah terpencil.

“Akses anak-anak di daerah terpencil untuk membaca itu sangat-sangat minim” — Ana

Pernyataan tentang adanya kesamaan kepentingan dalam penyediaan akses juga disampaikan oleh informan Ani.

“Bisa jadi perpanjangan tangan bagi dinas untuk tau di daerah ini tingkat literasinya bagaimana, dan daerah-daerah mana yang membutuhkan... eee yang masih membutuhkan koleksi buku untuk anak-anak atau untuk masyarakatnya secara umum” — Ani

Berdasarkan pernyataan Ani, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dari sudut pandang Dispusip, TBM berpotensi menjadi perpanjangan tangan mereka dalam meningkatkan minat baca masyarakat di daerah-daerah yang masih kekurangan akses koleksi buku. Meski demikian, baik informan Ana, Ani, dan Ina tidak mengeluarkan pernyataan yang merincikan tentang teknis kolaborasi yang dapat dilakukan.

Sementara itu, dalam wawancara diperoleh pendapat para informan TBM tentang siapa pihak yang dapat mendukung penyediaan bahan bacaan untuk TBM. Kesadaran akan peran setiap pihak menjadi potensi selanjutnya dalam mendukung kolaborasi antara TBM dan Dispusip Kab. X. Kesadaran dapat menentukan tahap inisiasi dan motivasi, serta tahap penyiapan media komunikasi dan informasi seperti apa yang harus diambil guna mewujudkan kolaborasi (Saleh dan Hanafi, 2020, p. 35). Menurut Alfa, pihak yang paling berperan dan dapat mendukung TBM Merah adalah masyarakat dan donatur individu. Ketika ditanya lembaga yang mungkin berperan, Alfa menyebutkan 3 lembaga yakni Dispusip Kab. X, BAZNAS, dan LAZ DASI, tetapi untuk Dispusip Kab. X, Alfa menyiratkan ketidakpuasannya terhadap lembaga ini,

“Pusda kami dikasih beberapa bantuan buku, kami juga diiming-imingkan dikasih beberapa fasilitas semenjak berdiri, tapi sampai sekarang kita tagih ndak ada, sabar aja” — Alfa

Informan Mia juga menyebutkan bahwa selama ini ia memperoleh donasi buku dari 1.000 Rumah Baca milik bunda Asma Nadia dan wakaf buku dari penerbit Sygma Daya Insani. Meski demikian, ia berharapnya ada pihak yang mau menyumbang buku kepada TBM Kuning, diantaranya adalah Dispusip Kab. X dan Dispusip Prov. NTB.

“Kalau harapan kami sih ya kita mengharapakan sekali banyak donatur yang menyumbang buku ke kita termasuk ya tadi disini peran perpustakaan daerah baik itu perpustakaan di kabupaten maupun provinsi. Kami berharapnya bisa mendapatkan bantuan untuk pengadaan bahan bacaan” — Mia

Berdasarkan pendapat kelima informan TBM, dua informan mengharapkan kehadiran Dispusip Kab. X sebagai pihak yang dapat mendukung penyediaan bahan bacaan untuk TBM. Sedangkan 3 informan lainnya tidak sama sekali menyebutkan Dispusip Kab. X dalam daftar pihak yang dapat mendukung mereka. Dengan temuan ini, Dispusip Kab. X dapat merumuskan pola komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat eksistensi dan peran perpustakaan umum di mata rekan-rekan pegiat TBM.

Dari sudut pandang TBM, potensi kolaborasi terdapat lebih banyak. Potret potensi TBM yang pertama dapat digali dengan melihat dampak keberadaan TBM. Dampak menjadi bukti konkret potensi strategis TBM dalam menghidupkan akses bahan bacaan bagi penggunaannya. Secara garis besar, berdasarkan pernyataan dari informan dari TBM Merah, Kuning, Hijau, dan ABC memiliki satu kesamaan pada dampak TBM terhadap kegiatan membaca anak-anak atau masyarakat sekitarnya. Hal ini berarti bahwa TBM-TBM tersebut telah berhasil mencapai 2 dari 5 tujuan didirikannya TBM menurut Saepudin (2017, p. 4), yakni meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca, menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca, serta membangun masyarakat membaca dan belajar. Sedangkan di TBM Jingga, dampak yang dirasakan adalah anak-anak Desa Jingga memperoleh alternatif ruang belajar dan tempat bermain.

“Sebenarnya manfaatnya ya. Maksudnya ternyata kita bisa menjadi alternatif ruang belajar buat adik-adik gitu, tempat bermain” — Cici

Tabel 2. Potensi TBM

No.	Informan	Potensi TBM
1	Ana	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jumlah anggota Dispusip Kabupaten X • Antusiasme pemanfaatan koleksi oleh anggota TBM lebih tinggi • Menjadi perpanjangan tangan Dispusip Kab. X untuk memberikan akses koleksi perpustakaan ke daerah terpencil
2	Ani	Menjadi perpanjangan tangan Dispusip Kab. X untuk memberikan akses koleksi perpustakaan ke daerah terpencil
3	TBM Merah	TBM berdampak pada peningkatan kegiatan membaca anak-anak atau masyarakat sekitar
4	TBM Kuning	TBM berdampak pada peningkatan kegiatan membaca anak-anak atau masyarakat sekitar
5	TBM Hijau	TBM berdampak pada peningkatan kegiatan membaca anak-anak atau masyarakat sekitar
6	TBM ABC	TBM berdampak pada peningkatan kegiatan membaca anak-anak atau masyarakat sekitar

Menurut Kemendikbud (dalam Indriyani, 2017), salah satu fungsi TBM adalah sebagai sumber belajar yang dapat mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dampak kehadiran TBM Jingga telah memenuhi fungsi tersebut. Berdasarkan data terkait dampak TBM, dapat disimpulkan bahwa TBM-TBM ini telah sesuai dengan fungsi, tujuan, dan prasyarat tahap kolaborasi berdasarkan berbagai sumber. Dalam rangka penyediaan akses koleksi, maka perlu melihat potensi kolaborasi ini berdasarkan koleksi TBM. Berdasarkan data yang diperoleh disimpulkan bahwa rata-rata koleksi unggulan dari TBM-TBM ini adalah koleksi buku anak, dan rata-rata kendala kekurangan koleksi juga mereka rasakan pada koleksi buku anak dan spesifikasi khusus. Merujuk pada tahap I kolaborasi oleh Saleh dan Hanafi (2020, p. 34) yaitu *Problem Setting Step*, kendala yang dihadapi TBM pada sisi ketersediaan koleksi anak dapat menjadi salah satu poin identifikasi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk berkolaborasi.

Bentuk Kolaborasi yang Diharapkan TBM dan Dinas Perpustakaan Dalam Penyediaan Akses Koleksi Perpustakaan

Pada paparan potensi di atas terungkap sejumlah kecil permasalahan yang TBM hadapi, dalam proses wawancara, peneliti menyampaikan pertanyaan spesifik tentang kendala yang TBM hadapi dalam penyediaan bahan bacaan. Terakhir, penulis menggali potensi kolaborasi antara Dispusip Kab. X dan TBM melalui tanggapan dan wacana bentuk kolaborasi versi masing-masing pihak. Potensi ini akan terkait dengan tahap II kolaborasi menurut Saleh dan Hanafi (2020, p. 34) yaitu *Direction Setting Step*. Dalam tahap *Direction Setting Step* diantaranya akan dilakukan penyusunan agenda kegiatan,

penentuan pilihan program kegiatan, penetapan berbagai kesepakatan (*agreement*) terkait dengan bidang-bidang yang dikolaborasikan, serta pola-pola pengorganisasiannya. Dengan potret potensi bentuk kolaborasi, kedua pihak dapat memperoleh gambaran awal agenda kegiatan seperti apa yang nantinya akan disusun.

Kolaborasi yang diharapkan oleh Dispusip Kab. X sebagaimana dituturkan oleh Ina adalah kolaborasi yang dapat membantu Dispusip Kab. X dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Sedangkan menurut Ani, kolaborasi yang diharapkannya adalah kolaborasi yang menjadikan TBM sebagai perpanjangan tangan dan mediator Dispusip Kab. X kepada masyarakat di daerah terpencil, terutama untuk menargetkan anak-anak di desa setempat agar menjadi gemar membaca.

TBM Merah sudah tidak mengajukan bantuan pada Dispusip Kab. X lagi karena menurut mereka buku yang diberikan tidak sesuai dengan target pembacanya sehingga buku tersebut justru tidak terpakai. TBM Merah berharap Dispusip Kab. X lebih memperhatikan koleksi buku yang disumbangkan.

“Hmm tidak pernah mengajukan lagi..udah capek bawa...Kalau saya dapet buku yang bagus itu dari donatur luar. Jujur nih kalau perpustakaan ngasih buku yang udah gak mereka pake disana. Iya jadi buku yang udah ga dipake disana udah jadul dan udah ga berlaku disana barulah didrop disini kayak gitu” – Anggun

Selain itu, Anggun juga menyebutkan bentuk kolaborasi yang ia harapkan adalah Pusteling. Ia berharap Dispusip Kab. X dapat mengunjungi TBM Merah secara terjadwal.

“Harapannya sebulan sekali bisa berkunjung kesini kayak perpustakaan keliling untuk anak-anak itu yang pertama. Saya juga pernah bersurat untuk perpustakaan keliling kesini suratnya udah diterima tapi belum dapat kunjungan sampai sekarang itu bersuratnya udah lebih dari 2 tahun yang lalu” – Anggun

Informan Mia menyatakan bahwa kolaborasi dengan Dispusip Kab. X dapat berupa optimalisasi mobil keliling. Ia berharap Pusteling tidak hanya membawa buku ke lokasi, tetapi juga melakukan kegiatan lainnya saat membuka mobil keliling, misalnya mendampingi anak-anak dalam memilih buku agar lebih tertata, dan membaca atau mendongeng. Sementara itu, secara spesifik Beta menyatakan bentuk kolaborasi yang paling mereka butuhkan adalah penyediaan bahan bacaan, kerja sama bisa dilakukan tidak hanya dengan memberikan hibah buku, bisa juga dengan meminjamkan buku-buku layak baca dan relevan untuk mereka bawa ke TBM-nya. Selebihnya, Alfa kembali menekankan tentang cara kolaborasi yang baik, yakni proses yang cepat dan tidak menggantung.

“Untuk harapannya ya seperti buku yang layak baca, kemudian emm cepat di follow up, jangan lama-lama gitu, soalnya ini untuk kemaslahatan anak bangsa, penerus bangsa, kemudian jangan di-php in (pemberi harapan palsu)” – Beta

TBM ABC Biru belum pernah melakukan kolaborasi apapun dengan Dispusip Kab. X, walaupun TBM ini memenuhi kriteria sebagai TBM di wilayah terpencil. Meski demikian, Sasa menyatakan bahwa ia pernah mendengar adanya kolaborasi antara TBM dan Dispusip Kab. X dari Komunitas Literasi X, dan sepengetahuan Sasa kegiatan kolaborasi tersebut benar terlaksana. Apabila diberi kesempatan untuk berkolaborasi, Sasa sangat senang dan setuju untuk melakukan kolaborasi dengan Dispusip Kab. X. Kolaborasi yang paling ia harapkan adalah penyediaan koleksi buku, kunjungan lapangan dari Dispusip Kab. X kepada TBM-TBM di daerah pelosok, dan program kunjungan dari anak-anak Desa Biru ke Gedung Perpustakaan Dispusip Kab. X. Tidak hanya TBM ABC Biru, informan Jingga juga mengatakan bahwa belum pernah ada kolaborasi yang terjalin antara TBM Jingga dengan Dispusip Kab. X. Meskipun begitu, informan mengetahui adanya beberapa TBM

sudah bekerja sama dengan Dispusip Kab. X dalam hal pelatihan pengelolaan TBM, sehingga ia menilai bahwa Dispusip Kab. X belum mampu menjangkau TBM Jingga.

TBM Jingga membuka kesempatan adanya kerja sama dengan Dispusip Kab. X. Walaupun koleksi buku mereka sudah banyak, tetapi ia masih ingin menambah koleksi buku bergambar. Informan mengharapkan Dispusip Kab. X untuk lebih sering menjangkau dan lebih kreatif. Menjangkau yang dimaksud adalah mampu merangkul tidak hanya ke sekolah-sekolah, tetapi juga kelompok-kelompok, seperti TBM, serta ke tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti tempat bermain anak, taman kota dan tempat-tempat berkumpul masyarakat. Selain itu, informan menyarankan agar Dispusip Kab. X untuk menyediakan buku anak yang merangsang daya motorik, seperti buku-buku yang berwarna dan bergambar.

Tabel 3. Potensi-potensi Kolaborasi yang Dapat Terjalin dengan TBM

No	Nama Instansi	Bentuk Kolaborasi yang Diharapkan
1	Dispusip Kab. X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi yang dapat membantu Dispusip Kab. X dalam meningkatkan minat baca masyarakat 2. Kolaborasi yang menjadikan TBM sebagai perpanjangan tangan dan mediator Dispusip Kab. X kepada masyarakat di daerah terpencil, terutama untuk menargetkan anak-anak
2	TBM Merah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan buku sesuai dengan target pembaca 2. Pusteling yang terjadwal 3. Sesi motivasi dari Dispusip Kab. X kepada pengelola TBM 4. Kunjungan dari anak-anak TBM ke Gedung Perpustakaan Dispusip Kab. X
3	TBM Kuning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusteling dengan kegiatan-kegiatan (pendampingan memilih buku, membaca, mendongeng) 2. Bantuan buku/penyediaan akses bahan bacaan sesuai target pembaca
4	TBM Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan cara yang relevan dengan kebutuhan TBM 2. Penyediaan bahan bacaan yang layak baca, relevan, proses yang cepat, dan tidak menggantung.
5	TBM ABC Biru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan buku sesuai dengan target pembaca 2. Kunjungan lapangan dari Dispusip Kab. X kepada TBM 3. Kunjungan dari anak-anak Desa Biru ke Gedung Perpustakaan Dispusip Kab. X
6	TBM Jingga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih merangkul TBM dan komunitas literasi di X 2. Bantuan buku anak-anak yang menarik

Dari Tabel 3, bentuk kolaborasi yang diharapkan oleh seluruh informan TBM adalah bantuan buku sesuai dengan target pengguna TBM yang didominasi oleh anak-anak. Kemudian, bentuk kolaborasi yang disebutkan dua orang informan adalah Pusteling, tetapi layanan Pusteling yang diharapkan adalah layanan Pusteling yang terencana dengan jadwal tetap dan kegiatan penyertanya. Bentuk kolaborasi yang juga disebutkan oleh dua informan adalah kunjungan dari pihak TBM ke Gedung Perpustakaan Dispusip Kab. X. Dua bentuk kolaborasi lainnya yang terungkap adalah kunjungan lapangan dari Dispusip Kab. X ke TBM-TBM daerah terpencil, dan sesi motivasi. Disamping itu, informan Dispusip dan TBM Hijau menyampaikan bentuk kolaborasi yang sifatnya *intangibile*, yakni kolaborasi yang relevan, meningkatkan minat baca masyarakat, dan menjadi jembatan antara Dispusip Kab. X dan masyarakat daerah terpencil.

Kesimpulan

Dispusip Kab. X sudah melakukan upaya dalam pemberian akses koleksi perpustakaan kepada masyarakat di daerah terpencil di wilayah Kab. X dengan memberikan layanan perpustakaan

keliling dan hibah buku. Akan tetapi kedua program tersebut dilakukan berdasarkan permintaan sehingga perlu kesadaran dan dorongan secara mandiri dari masyarakat di daerah terpencil untuk mengajukan permohonan menjadi salah satu penerima layanan perpustakaan keliling dan hibah buku. Belum ada promosi yang rutin dilakukan oleh pihak Dispusip Kab. X yang menyebabkan semakin terbatasnya masyarakat yang mengetahui layanan dan program tersebut. Di samping itu, TBM memiliki potensi untuk menjadi jembatan dalam penyediaan akses koleksi perpustakaan di daerah terpencil. Dari sisi pengguna, 5 (lima) TBM yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki pengguna aktual lebih dari 10 orang per hari yang sulit menjangkau langsung Dispusip Kab. X. Dari segi kepemilikan koleksi, TBM-TBM ini masih kekurangan koleksi khususnya bahan bacaan anak. Kesenjangan sumber daya justru dapat menjadi peluang bagi Dispusip Kab. X dalam menyediakan koleksi perpustakaan ke masyarakat daerah terpencil melalui TBM. Kolaborasi dalam penyediaan koleksi di TBM pun diharapkan oleh TBM-TBM di daerah terpencil. Sampai saat ini, Dispusip Kab. X telah melakukan empat kegiatan dengan TBM yakni hibah buku, perpustakaan keliling, kursus, dan lomba. Kegiatan-kegiatan ini belum dapat dikategorikan sebagai kolaborasi karena Dispusip Kab. X hanya melibatkan TBM secara pasif, dimana TBM tidak dilibatkan pada program/kegiatan secara penuh.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- IFLA. (2022). *IFLA/UNESCO public library manifesto 2022*. IFLA.
<https://repository.ifla.org/handle/123456789/2006>
- Irmadella, A. (2018). *Model kolaborasi stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya*. Repository Universitas Airlangga, hlm 4.
- Indriyani, I. (2017). *Pengelolaan taman bacaan masyarakat berbasis kekeluargaan dan dampaknya terhadap kemajuan literasi masyarakat [Master's thesis: Universitas Negeri Semarang]*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.) *Kolaborasi*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kolaborasi>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Indeks aktivitas literasi membaca 34 provinsi*.
http://repositori.kemdikbud.go.id/13033/1/Puslitjakkdikbud_Indeks%20Aktivas%20Literasi%20Membaca%2034%20Provinsi%20Alibaca
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Petunjuk pelaksanaan apresiasi taman bacaan masyarakat (tbn) kreatif-rekreatif tahun 2021*.
<https://repositori.kemdikbud.go.id/22578/1/02%20Juklak%20TBM%20Kreatif%20Rekreatif%202021.pdf>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *NSPK petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan taman bacaan masyarakat rintisan*.
<https://repositori.kemdikbud.go.id/1233/1/Petunjuk%20Teknis%20TBM%20Rintisan.pdf>

- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?*. ANU Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_458884
- Pham H. T., & Tanner, K. (2014). Collaboration between academics and librarians: A literature review and framework for analysis. *Library Review*, 63(1/2), 15- 45. <https://doi.org/10.1108/LR-06-2013-0064>
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati Nomor 6 Tahun 2013. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156336/permenkes-no-6-tahun-2013> Peraturan
- Perpustakaan Nasional. (2017). *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, Nomor 8 Tahun 2017*.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5461/pp-no-24-tahun-2014>
- Raharja, S. J., & Akhmad. D. (2019). Analisis jaringan kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan hiv/aids: Studi di Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 9-48.
- Raharjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>
- Saepudin, E., Sukaesih, S., & Rusmana, A. (2017). Peran taman bacaan masyarakat (TBM) bagi anak-anak usia dini. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.24198/jkip.v5i1.10821>
- Saleh, C., & Hanafi, I. (2020). *Modul: Kolaborasi pemerintahan*. Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/dapu6107-kolaborasi-pemerintahan/>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tasruddin, Ramsiah. (2015). Proses kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal UIN Alauddin*, 2(1), 49-54.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. <https://www.perpusnas.go.id/lawdetail.php?lang=id&id=170920114322Ir9g6H hRuc>
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Yin. (2004). *Case study research: Design and methods (3rd Ed.)*. Sage Publications.